

sudah sewajarnya gaji tersebut digunakan untuk keperluan karyawan bukan dipaksa untuk harus membelikan beras.

Akan tetapi setelah berjalanya waktu di tetapkannya upah sistem tandon di Toko RANDU Surabaya ada salah satu karyawan Toko RANDU Surabaya yang bernama Fanny Eka Nawangwulan yang hendak ingin mengundurkan diri dari Toko RANDU dengan alasan Fanny sedang mengandung dan usia kandungannya sudah hampir memasuki usia 9 bulan.

Fanny mengundurkan diri dari Toko RANDU pada awal bulan Juli 2016. Dan Fanny telah bekerja selama 6 bulan terhitung dari bulan Januari 2016, maka Fanny seharusnya mendapatkan sisa gaji yang belum terbayarkan tersebut sebesar Rp.1.200.000 terhitung sampai bulan Juni 2016. Akan tetapi pada kenyataannya Fanny tidak mendapatkan haknya yakni sisa gaji yang ditandon selama 6 bulan yang totalnya sebesar Rp.1.200.000. karena menurut pemilik Toko RANDU Surabaya beralasan bahwa Fanny sendiri lah yang meminta untuk berhenti bekerja bukan kemauan dari pemilik Toko RANDU. Dengan alasan seperti itu pemilik Toko RANDU Surabaya tidak memberikan haknya Fanny dalam hal ini sisa gaji yang ditandon selama 6 bulan tersebut.

Melihat apa yang dilakukan oleh pemilik Toko RANDU Surabaya dengan karyawannya sendiri yaitu Fanny, pemilik Toko RANDU dinilai telah melakukan perbuatan dzolim terhadap karyawannya sendiri dengan tidak memberikan haknya sebagai karyawan di Toko RANDU yaitu gaji yang belum terbayarkan. Dan dengan alasan apapun hal tersebut tidak

tenaga seseorang, pekerja harus mendapatkan imbalan yang layak dari apa yang telah disumbangkan dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang dan juga tidak melebihi dari apa yang telah di tentukan.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Sistem Tandon Di Toko randu Surabaya

Dalam pengupahan karyawan di toko randu Surabaya, pemilik Toko RANDU mempunyai sistem pengupahan sendiri yang berbeda dengan toko-toko yang lain. Di Toko RANDU Surabaya menerapkan upah sistem tandon untuk karyawannya.

Upah sistem tandon adalah sistem pengupahan karyawan yang ada di Toko RANDU Surabaya yang mekanismenya, setiap karyawan Toko RANDU mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap bulannya. Akan tetapi setiap karyawan hanya mendapatkan gaji mereka sebesar Rp 1.800.000 untuk setiap bulannya dan sisa gaji karyawan yang belum terbayarkan sebesar Rp 200.000 per bulan. Dan sisa gaji yang belum terbayarkan tersebut berjumlah Rp 200.000 untuk di tandon atau ditahan sampai akhir tahun.⁷

Jadi sisa gaji untuk setiap karayawan yang belum terbayarkan sampai akhir tahun sebesar Rp. 2.400.000. dan sisa gaji sebesar Rp 2.400.000 tersebut tidak diberikan berupa uang tunai melainkan di tukar dengan beras

⁷ Siyatik (Pemilik Toko Randu Surabaya), *Wawancara* Surabaya, 30 November 2016.

“pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah negara republik Indonesia”.

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 21 ayat (1) sudah jelas bahwasannya hasil akhir dari praktek pengupahan yang ada di Toko RANDU Surabaya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Karena hasil akhir dari praktek upah sistem tandon ini, setiap karyawan mendapatkan upah yang ditandon tersebut berupa beras yang jumlahnya sama dengan upah yang ditahan untuk setiap karyawannya. Dan yang seharusnya upah tersebut harus dibayarkan dengan uang rupiah negara republik Indonesia.

Mengenai masalah yang di alami oleh Fanny eka nawangwulang yang disini Fanny sebagai karyawan di Toko RANDU Surabaya tidak mendapatkan haknya sebagai karyawan yakni sisa upah yang belum dibayarkan oleh pemilik Toko RANDU. Dan Fanny sendiri telah bekerja selama 6 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2016. Akan tetapi pada awal bulan Juli 2016 Fanny mengundurkan diri dari Toko RANDU Surabaya. Jadi sisa upah Fanny yang ditandon oleh pemilik toko sebesar Rp. 1.200.000.

Menyikapi hal ini pemerintah sudah memberikan jaminan kepada pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan haknya dalam hal ini gaji karyawan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pasal 2 yang berbunyi hak pekerja/buruh atas upah timbul pada

saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, sudah jelas bahwasannya majikan harus membayarkan upah atau gaji kepada karyawannya karena gaji tersebut adalah hak dari karyawan. Maka dari itu memberikan upah kepada para karyawan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha karena itu merupakan hak dari para karyawan setelah melaksanakan pekerjaannya.

